

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan Yunani terhadap pencari suaka dari kawasan MENA selama pandemi COVID-19 (2020–2023), yang meskipun dianggap melanggar hukum internasional, tidak dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori keamanan kesehatan dan migrasi paksa, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama: politik, institusional, dan struktural, yang menjelaskan mengapa Yunani dapat menghindari sanksi. Temuan menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi dalam konteks kesehatan publik menjadi instrumen pembenaran kebijakan yang restriktif, ditambah dengan dukungan implisit dari Uni Eropa karena peran strategis Yunani sebagai penjaga perbatasan eksternal. Studi ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia selama krisis global.

Kata kunci: Yunani, COVID-19, pencari suaka, Uni Eropa, keamanan kesehatan

ABSTRACT

This study examines Greece's policy toward asylum seekers from the MENA region during the COVID-19 pandemic (2020–2023), which, despite being considered a violation of international law, has not been sanctioned by the European Union. Using a qualitative approach with a theoretical framework of health security and forced migration, this study identifies three main factors: political, institutional, and structural, which explain why Greece was able to avoid sanctions. Findings indicate that the securitization of migration within the context of public health serves as a justification for restrictive policies, further supported by implicit EU backing due to Greece's strategic role as an external border guardian. The study highlights the challenges in balancing security interests with human rights protection during a global crisis.

Keywords: *Greece, COVID-19, asylum seekers, European Union, health security*